



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR

*FINANCIAL STATISTICS OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF ALOR REGENCY*

2022



STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR

*FINANCIAL STATISTICS OF THE REGIONAL
GOVERNMENT OF ALOR REGENCY*

2022



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ALOR
BPS-STATISTICS OF ALOR REGENCY**

**STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ALOR
FINANCIAL STATISTICS OF LOCAL GOVERNMENT OF ALOR REGENCY
2022**

ISSN : :

No Publikasi/ Publication Number : 53070.2333

Katalog BPS/ BPS Catalogue : 7203005.5307

Ukuran Buku/ Books Size : A5 (14,8 x 21 cm)

Jumlah Halaman/ Page : viii + 24

Naskah/ Manuscript :

Fungsi Statistik Distribusi Kabupaten Alor/ *Sub-division of Distribution Statistics of Alor Regency*

Penyunting/ Editor :

Fungsi Statistik Distribusi Kabupaten Alor/ *Sub-division of Distribution Statistics of Alor Regency*

Diterbitkan Oleh/ Published by:

© Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor/ BPS-Statistics of Alor Regency

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics of Indonesia.

TIM PENYUSUN/TEAM MEMBERS

Pengarah/Director

Mangiring Situmorang, SE, M.Si

Penanggung Jawab/Persons in Charge

Mangiring Situmorang, SE, M.Si

Penyunting/Editors

Haji Djasingtang, SE

Pengolah Data dan Penulis Naskah/Data Processor and Writers

Baiq Liana Rohadatul Aisy, S.Tr.Stat

Penata Letak/Layout Designers

Baiq Liana Rohadatul Aisy, S.Tr.Stat



KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor 2022 ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Alor. Publikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen data terhadap data statistik keuangan pemerintah daerah.

Data yang disajikan dalam publikasi ini yaitu data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah Kabupaten Alor Tahun 2022. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari kantor Pemerintah Kabupaten Alor, yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor.

Saran dan kritik berbagai pihak dalam rangka perbaikan publikasi ini pada masa mendatang sangat kami harapkan. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah ikut membantu sehingga publikasi ini dapat terwujud, kami mengucapkan terima kasih.

Kalabahi , Desember 2023
Kepala BPS
Kabupaten Alor

Mangiring Situmorang



PREFACE

The Publication of Local Government of Alor Regency in 2022 is a report issued by BPS-Statistics of Alor Regency. This publication is issued to meet the needs of consumers of financial statistics of local government data.

The data presented in this publication are data realization of receipt and expenditure of Alor Government in 2022. The data represent a compilation of data received from Regional Finances and Assets Service of Alor.

Any suggestions and criticisms to improve the next publications will be cordially welcome. Finally, to all those who have supported to make this publication can be realized, we render many thanks.

*Kalabahi , Desember 2023
Chief Statistician of
Alor Regency*

Mangiring Situmorang

DAFTAR ISI/CONTENTS

	Halaman <i>Page</i>
Kata Pengantar/ <i>Preface</i>	xii
Daftar Isi/ <i>Contents</i>	xiii
Daftar Tabel/ <i>List of Tables</i>	xv
1.1. Penjelasan Umum/ <i>General Explaination</i>	2
1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan data/ <i> Scope and data collecting method</i>	2
1.3. Konsep dan Definisi/ <i> Concept and Definition</i>	2
2.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2021-2022/ <i> Alor District Government Finance,2021-2022</i>	15

DAFTAR TABEL/*LIST OF TABLES*

	Halaman <i>Page</i>
Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan, Belanja dan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2020-2022 <i>Table 1. Growth of Revenue, Expenditure, and Local-Own Revenue of Alor Regency Government, 2020-2022.....</i>	14
Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2021-2022 <i>Table 2. Realization of Receivement of Alor District Government, 2021-2022.....</i>	17
Tabel 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2021-2022 <i>Table 3. Realization of Local Expenditure of Government of Alor Regency, 2021-2022.....</i>	20

<https://alorkab.bps.go.id>

1

Mengapa publikasi statistik keuangan Pemerintah Daerah sangat penting?

Karena data statistik keuangan pemerintah daerah harus dipublikasikan sebagai wujud dari transparansi dalam pemerintahan



Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa **transparansi** adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

1. PENJELASAN UMUM

1.1. Pendahuluan

Publikasi statistik keuangan daerah Alor diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Alor, yang menyajikan data tentang realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah di Kabupaten Alor tahun 2020.

Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan data keuangan pemerintah daerah di Alor terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang dapat digunakan untuk membuat kebijakan umum rinci dan tepat.

1.2. Ruang Lingkup dan Metode Pengumpulan Data

Data Statistik Keuangan ini diperoleh dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor yang dikumpulkan menggunakan daftar K-2 dan APBD-2.

1.3. Konsep dan Definisi

Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota adalah realisasi perhitungan APBD Kab/Kota pada tiap tahun anggaran.

Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan

1. GENERAL EXPLANATION

1.1. Introduction

The publication of “Financial Statistics of Local Government of Alor” published by BPS-Statistics of Alor regency, which presents data about realization of government revenues and expenditures in Alor Regency in 2020.

This publication is presented to fulfill financial data requirements of local government in Alor especially to see the potency of the region in the terms of revenue and expenditure which can be used to make detailed and precisely public policy.

1.2. Scope and data collecting method

The financial statistics data was obtained from Regional Finances and Assets service of Alor by using questionnaire of K-2 and APBD-2.

1.3. Concept and Definition

Realization of Revenue and Expenditure of Regency/Municipality Government is the Regency Municipality budget realization calculations for every fiscal year. Local government revenue consists of:

- a. Local Own-Source Revenue
- b. Balance Budget

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pajak daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan ke daerah.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dilakukan sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh Pemda secara langsung dan nyata kepada pembayar. Retribusi daerah meliputi antara lain, pelayanan kesehatan, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir dan/atau pertokoan, terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga, ijin mendirikan bangunan,

c. Other Legal Revenue

Original local government revenue is the region income which is collected based on local regulation in accordance to regulation of legislation to collect funds for financing its activities. Original local government revenue consists of: **local taxes, local retributions, output of management of separated regional government assets, and other local government original revenues.**

Local taxes are collections which conducted by local government based on regulation of legislation which prevails. These local taxes can be divided into two categories: local and state taxes whose management and use are delegated to the regions.

Local Retributions is revenue that collected based on any services or facilities provided by the local government directly to taxpayers. Retributions include health care, testing of motor vehicles, fire extinguishers checking, the replacement cost of printing maps, educational services, the use of regional assets, wholesale or retail markets, terminals, slaughter house, recreation/sports, the land use designation permits, licenses route of public transport, and other.

ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba PDAM, bagian laba lembaga keuangan bank, bagian laba lembaga keuangan non bank, bagian laba perusahaan milik daerah lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Lain-lain PAD yang sah antara lain: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah, komisi, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan lain-lain.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK).

Bagi hasil pajak terdiri dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan

Revenue of Local Government Corporate and Management of Restricted Local Assets is revenue in the form of revenue of local government corporate and management of restricted local assets which consists of the Local Water Company's earnings, the profit share of bank, the profit share of nonbanking financial institutions, the other locally-owned company's profits, and the return on equity/investment to a third party.

Other local government original revenues include: asset sales revenue of local government that are not separated, receipt of demand deposits, receipts of interest, receipt of compensation of regional assets, commissions, penalties for late of work, and others.

Balance Budget is funds sourced from the APBN that are allocated to local government to fund regional needs in implementation of decentralization. Balance fund consists of tax share, nontax share/natural resources, general allocation fund (DAU), and special allocation fund (DAK).

Tax share consists of property tax revenue, revenue of acquirement right of property, income tax sharing

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, PPh Pasal 21 orang pribadi, dan lain-lain.

Bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam terdiri atas iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH), pemberian hak atas tanah negara, landrent, iuran eksplorasi/eksploitasi/royalti, pungutan pengusaha perikanan dan hasil perikanan, hasil pertambangan minyak bumi/gas alam, dan lain-lain.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiscal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

Dana alokasi khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan rumus dana alokasi umum
2. Kebutuhan merupakan komitmen

section 25 (PPh 25) and section 29 (PPh 29) Domestic Personal Taxpayer, income tax sharing section 21 (PPh 21), and others.

Sharing Fund of Non-Tax/Natural Resources consist of dues of utilization right of forest (HPH), provision of forest resources (PSDH), land titling state, landrent, dues of exploration/exploitation/royalties, retribution on fishery enterprise and result of fishery, mining oil/gas nature result, and others.

General Allocation Fund (DAU) is the fund transfer from the central government to local government to reduce the fiscal gap across regions and the equalization of fiscal capacity to support the independence of local governments in carrying out its functions and duties to serve the public.

Special Allocation Fund (DAK) is a fund set up to the region to fulfill special need. There are three criterias for special need as set out in the legislation, namely:

1. The need cannot be calculated by using the formula of the general allocation fund
2. The need is a commitment

atau prioritas nasional Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

Lain-lain Pendapatan yang Sah adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan/atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah mencakup pendapatan hibah; dana darurat yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa dan/atau krisis solvabilitas; dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dana penyesuaian dan otonomi khusus dari pemerintah; bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya; dan pendapatan yang sah lainnya.

Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung
2. Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan pengeluaran tidak terduga, yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

or national priority Thus DAK is basically a specific transfer for the purposes that have been outlined.

Other Legal Revenue is other revenue that coming from the central government and or from the central agencies, as well as from other local government. Other legal revenue consists of grants; emergency fund, which is fund of the state budget allocated to areas where national disaster, extraordinary events, and or solvency crisis occur; revenue sharing fund of tax from provincial and other local governments; contingency funds/ balancing/ adjustment from government; financial assistance from provincial and other local governments; and other legal revenue.

Local Government Expenditure

Local Government Expenditure consists of:

1. *Indirect Expenditure*
2. *Direct Expenditure*

Indirect Expenditure is part of personnel expenditure, interest expenditure, subsidy expenditure, grant expenditure, social assistance expenditure, sharing fund expenditure, financial assistance expenditure, and unpredicted expenditure. Those items are not directly related to the implementation of programs and activities.

Belanja Pegawai Tidak Langsung adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk di sini adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD, gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja Bunga adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (principal outstanding) dan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Belanja Subsidi adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/ lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/ lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

Personnel Expenditure is a compensation in the form of salaries and benefits, and other income provided to civil servants based on legislation. Another compensation include here are representations and allowances for head and the members of parliament, salaries and allowances of regional head and deputy head of the region, as well as other income that stipulated under law budgeted.

Interest Expenditure is expenditure used to pay debt interest that calculated based on the principal outstanding under the short term, medium term, and long term agreement.

Subsidy Expenditure is expenditure that has been budgeted and used to support the cost of production to the certain company/organisation, so that the selling price of the goods/ services produced can be affordable. The intended company/agency must be providing products or services for public needs.

Belanja Hibah adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan adalah pemberian bantuan kepada organisasi kemasyarakatan untuk tujuan sosial, yang dilakukan secara selektif dan mempunyai kejelasan dalam penggunaannya.

Bantuan Partai Politik adalah pemberian bantuan kepada partai politik yang dianggarkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagai bantuan sosial.

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada

Grant Expenditure is expenditure that has been budgeted to give to other party as a grant in form of money, goods, and or services. The grant can be given to the central government, other local governments, village government, regional corporate/SOEs/ROEs, private agency/institution/organization, or group of community// individual.

Social Assistance Expenditure is expenditure that is budgeted to provide assistance to civil society organizations, political parties, and others with the aim to improve the welfare of the community.

Social Assistance to Community Organizations is the provision of assistance to community organizations for social purposes. This assistance done selectively and has clarity in its use.

Social Assistance to Political Party is the provision of assistance to the political parties that is budgeted under law as social assistance.

Sharing Fund Expenditure to Provincial/Regency/Municipality and Village Government is expenditure that has been budgeted as sharing fund which is derived from provincial revenue, and given to regency/municipality, village,

kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil ini terdiri atas :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan. Bantuan keuangan ini terdiri atas :

- Bantuan keuangan kepada

or a particular local government revenues that is given to other local governments in accordance with law. This expenditure consists of:

- *Sharing fund of local taxes expenditure to the provincial government*
- *Sharing fund of local taxes expenditure to the regency/municipality government*
- *Sharing fund of local taxes expenditure to the village government*
- *Sharing fund of local retributions expenditure to the regency/municipality government*
- *Sharing fund of local retributions expenditure to village government*

Financial Assistance Expenditure to Provincial/ Regency/ Municipality and Village Government is a general or specific assistance from the provincial government to the regency/municipality, village, or other local governments for equalizing and increasing the financial capability. General financial assistance is the assistance from the local government which the use and the management of fund is done by the recipient government. Special financial assistance is the assistance which the used and the management of fund is directed by the donor government. Financial Assistance consists of:

- *Financial assistance to the provincial government*

- pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya
- Bantuan keuangan kepada partai politik
- *Financial assistance to the regency/ municipality government*
- *Financial assistance to the village government*
- *Financial assistance to local governments/ other village governments*
- *Financial assistance to Political Party*

Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung adalah bagian belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Pegawai Langsung adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Unpredicted Expenditure is expenditure used for the activity that is unusual or unexpected such as natural disaster and social disaster, including refund of the excess revenue from previous years.

Direct Expenditure is a part of personnel expenditure, goods and services expenditure, and capital expenditure. Those items are budgeted directly related to programs and activities implementation.

Direct Personnel Expenditure is expenditure used for honorarium/wages, overtime, and other expenditure to increase employee motivation and quality implementing government programs and activities.

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/ pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan,

Goods and Services Expenditure is expenditure used for purchasing/procurement of goods that worth less than a year (non-durable goods), and or the use of services in carrying out the programs and activities of the local government. Purchasing/procurement of the goods and services include nondurable goods, materials, office services, insurance premiums, vehicle maintenance, printing and copying, building rent, vehicle rent, heavy equipment rent, leasing of office supplies and equipment, food and beverages, uniforms, wearpack, official journey, travel duty, returning officers, and other goods and services.

Capital Expenditure is expenditure used for purchasing/procurement of a tangible fixed asset that worth more than a year (durable goods). The establishment of these assets include procurement of land, heavy equipment, transportation equipment, workshop tools, agricultural processing and maintenance equipment, equipment and office supplies, computers, household appliance, studio equipment, communication tools, measuring tools, transmitting equipment, medical equipment, laboratory equipment, school practice tools, construction of roads,

buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/ keamanan.

bridges, water installations, street lighting, parking area and urban forests, electric and telephone installations, waste management, buildings, books/ literature, arts, animal/livestock and plants, and weapons/ security.

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran, sebaliknya surplus anggaran akan dialokasikan dalam pengeluaran pembiayaan, baik untuk pembayaran pokok hutang, maupun untuk investasi atau pembentukan dana cadangan. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pembiayaan daerah ;
 - Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya
 - Pencairan dana cadangan
 - Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Penerimaan pinjaman daerah
 - Penerimaan kembali pemberian pinjaman
 - Penerimaan piutang daerah
 - Penerimaan kembali investasi dana bergulir

Local Government Financing is any revenue that needs to be paid back and /or expenditure that will be readmitted, in the current fiscal year and in the next fiscal years. Net financing is the difference between financing revenue and financing expenditure. Total net financing should be able to cover the budget deficit, otherwise budget surplus would be allocated to financing expenditure, whether for principal repayment or for investment or creation of a reserved fund. Local government financing consists of:

1. Local government financing revenue;
 - Last Fiscal Year Budget Surplus
 - Reserve Fund Disbursement
 - Proceeds from Sale of Restricted Local Assets
 - Proceeds of Local Governmet Loan
 - Recovery of Lending
 - Proceeds of Local Receivable
 - Recovery of Revolving Fund Investment

2. Pengeluaran pembiayaan daerah;

- Pembentukan dana cadangan
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- Pembayaran Pokok Utang
- Pemberian Pinjaman Daerah

2. *Local government financing expenditure;*

- *Appropriation to Reserved Fund*
- *Local Government Equity Participation*
- *Principal Repayment*
- *Local Government Lending*

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan adalah merupakan selisih lebih dari surplus/ defisit ditambah dengan pos penerimaan pembiayaan dikurangi dengan pos pengeluaran pembiayaan.

Current Fiscal Year Budget Surplus is a surplus/deficit plus the financing revenue minus financing expenditure.

2

Penerimaan Daerah



Turun/ Decrease
4,66%

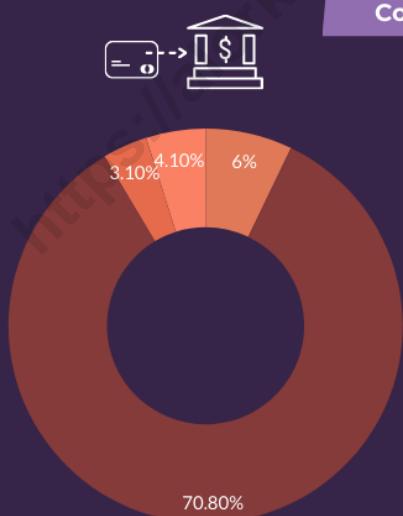
2021-2022

Belanja Daerah

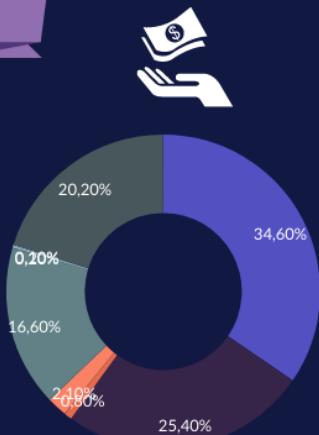


Turun/ Decrease
2,05%

Kontribusi/ Contribution



- PAD/Local own-source Revenue
- Dana Perimbangan/Balance fund
- Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Legal Revenue
- Pembiayaan Daerah/ Local Government Financing



- Belanja Pegawai/ Personnel Expenditure
- Belanja Barang dan Jasa/ Good and service Expenditure
- Belanja Hibah/ Grant Expenditure
- Belanja Bantuan Sosial/ Social Assistant Expenditure
- Belanja Modal/ Capitals Expenditure
- Belanja Tidak Terduga/ Unpredicted Expenditure
- Belanja Bagi Hasil/ Sharing Fund Expenditure
- Belanja Bantuan Keuangan/ Financial Assistance Expenditure

2. ULASAN

2.1 Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor

Keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar mampu mewujudkan pembangunan daerah yang harmonis dan seimbang demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang dikelola secara lebih efektif dan efisien.

Oleh sebab itu, nominal yang tertuang dalam APBD bukanlah sekedar angka tanpa makna, akan tetapi merupakan program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah pada tahun anggaran yang bersangkutan. Untuk itu perlu dilakukan pengumpulan data statistik keuangan daerah untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Keuangan daerah diperlukan untuk:

- Penyusunan neraca ekonomi daerah, tabel input-output, dan neraca arus dana.
- Memberi gambaran tentang realisasi APBD
- Mengetahui potensi dan sumber dana

2. BRIEF DESCRIPTION

2.1. Alor District Government Finance

Regional finances must be managed properly in order to be able to realize harmonious and balanced regional development for the creation of a just and prosperous society. One of the efforts to achieve this goal is to make improvements and refinements in the area of regional finance through the implementation of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) which is managed more effectively and efficiently.

Therefore, the nominal stated in the APBD is not just a number without meaning, but is a program that will be implemented by the regional government in the relevant fiscal year. For this reason, it is necessary to collect regional financial statistical data for analysis and decision making purposes. Local finance is required to:

- *Preparation of regional economic balances, input-output tables, and balance of funds flows.*
- *Provide an overview of the realization of the APBD*
- *Knowing the potential and sources of funds*

- Sebagai informasi bagi pemerintah daerah di setiap jenjang untuk menentukan jenis dan besarnya bantuan pembangunan untuk pemerintah di level bawahnya.
- Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan APBD merupakan gambaran mengenai langkah kongkrit pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik.
- As information for local governments at every level to determine the type and amount of development assistance for governments at lower levels.
- Local government policies in implementing The Local Budget are an illustration of local government in providing public services in concrete.*

Tabel 1. Pertumbuhan Pendapatan, Belanja, dan PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2020-2022

Table 1. Growth of Revenue and Expenditure of Alor Regency Government, 2020-2022

Indikator/ Indicators	Pertumbuhan/ Growth	
	2020 - 2021 (%)	2021 - 2022 (%)
Pendapatan/Revenue	0,78	-4,66%
Belanja/Expenditure	-0,54	-2,05%
PAD/Local own-source Revenue	-17,67	28,81%
Pertumbuhan PDRB/Growth of GDRP 2021: 2,5% Pertumbuhan PDRB/Growth of GDRP 2022: 2,95%		

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor.

Source: Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Alor Regency

Pemerintah daerah dituntut menjadi penggerak utama dalam perekonomian di daerahnya agar dapat terus mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Terutama pasca pandemi covid-19 yang sangat menantang. Hal tersebut tercermin dalam perekonomian di Kabupaten Alor

Local governments are required to be the main driver in the economy in their regions so that they can continue to experience positive growth from year to year. Especially after experiencing tough challenges during the Covid-19 pandemic. This reflect the economy in Alor Regency in 2021 to experience

pada tahun 2021 yang berhasil mengalami pertumbuhan positif sebesar 2,5 persen. Searah dengan perekonomiannya, pendapatan daerah juga mengalami peningkatan.

Tercatat pada 2021 pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Alor meningkat sebesar 0,78 persen. Akan tetapi belanja daerah turun sebesar 0,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu pula PAD juga mengalami penurunan sebab pada tahun 2021 kondisi di Kabupaten Alor belum terbilang cukup normal sehingga serapan PAD tidak optimal pada tahun 2021.

Penurunan PAD ini merupakan kontribusi dari penurunan Hasil Retribusi Daerah dan Pajak Daerah. Belanja daerah juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebab banyaknya kegiatan pemerintahan yang dibatalkan akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021.

Meski begitu kondisi perekonomian tahun 2022 di Kabupaten Alor justru mengalami peningkatan dan tumbuh positif sebesar 2,95 persen. Fenomena ini bertolak belakang dengan perubahan belanja pemerintah daerah dan pendapatan daerah yang berkurang dibandingkan tahun 2021. Hal ini karena kontribusi belanja pemerintah terhadap perekonomian hanya memiliki

positive growth of 2.5 percent. As the economy, regional income have also increase during this pandemic.

Recorded on 2021 regional income of Alor Regency increased by 0.78 percent. But, regional expenditures decreased by 0.54 percent compared to the previous year. So Local own-source Revenue (PAD) was also decreased because conditions in Alor Regency were still not normal yet so that income from PAD not optimal on 2021.

This decrease in PAD was a contribution from Regional Retribution and Regional Taxes that was also deacreased in share. Meanwhile, regional spending has decreased compared to the previous year due to many government activities being canceled due to the COVID-19 pandemic.

Even so, the conditions in 2022 economic growth in Alor Regency still positive 2.95 percent. This phenomenon is contrast to the changes in local government expenditure and local government revenue. It was because the contribution of government spending compared to other expenditures to the economy in Alor Regency only has a contribution about

kontribusi sebesar 41,60 persen sedangkan 73,38 persen sisanya merupakan kontribusi pengeluaran rumah tangga dan pengeluaran dari lainnya, sehingga belanja pemerintah dan pendapatan daerah yang mengalami penurunan tidak mempengaruhi perekonomian Kabupaten Alor secara umum dan tetap mengalami pertumbuhan positif.

Pada tahun 2022 belanja pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 2,05 persen dan pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 4,66 persen. Sedangkan PAD mengalami peingkatan sebesar 28,81 persen. Penurunan belanja daerah ini disebabkan karena ada pembatasan belanja pegawai pada tahun 2022. Begitu pula pendapatan daerah berkurang akibat berkurangnya tranfer dana perimbangan. Sedangkan peningkatan PAD disebabkan karena adanya peningkatan perolehan dari retribusi daerah. Rincian pendapatan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.

41.60 percent while the remaining 73.38 percent is the contribution of household spending and other kind of expenditures, so that the declining in government spending and revenue not really affect the economy of Alor Regency in general and still have positive growth on 2022.

On 2022, regional government spending decrease by 2.05 percent and regional income decrease by 4.66 percent. Meanwhile, Local own-source Revenue (PAD) experienced an increase of 28.81 percent. This decrease in regional spending is due to restrictions on personnel spending in 2022. Likewise, regional income has decreased due to reduced transfers of balancing funds. Meanwhile, the increase in PAD was due to an increase in revenues from local retribution. Details of regional income can be seen in Table 2

Tabel 2. Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2021-2022
Table 2. Realization of Receivement of Alor District Government, 2021-2022

Indikator/ Indicators	2021 (Rp.000)	Kontribusi/ Contribution	2022 (Rp.000)	Kontribusi/ Contribution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENERIMAAN DAERAH/ REGIONAL RECEIVEMENT	1.113.305.995	100,0%	1.076.648.704	100,0%
A. Pendapatan Daerah/ Local Revenue	1.083.381.602	97,3%	1.032.929.918	95,9%
1. PAD/Local own-source Revenue	50.490.184	4,5%	65.038.649	6,0%
1.1. Pajak Daerah/ Local Taxes	10.814.158	1,0%	14.210.737	1,3%
1.2. Retribusi Daerah/ Local Retribution	22.598.081	2,0%	31.993.798	3,0%
1.3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan/ Revenue of Local Government Corporate and Management of Separated Local Assets	1.659.801	0,1%	1.055.507	0,1%
1.4. Lain-lain PAD yang Sah/ Other Legal Local Own-Source Revenue	15.418.144	1,4%	17.778.607	1,7%
2. Dana Perimbangan/ Balance fund	994.746.727	89,4%	761.904.479	70,8%
2.1. Bagi Hasil Pajak/ Sharing Fund of Tax	15.416.307	1,4%	18.987.592	1,8%
2.2. Bagi Hasil Bukan pajak (SDA)/ Sharing Fund of Non-Tax (Natural Resources)	12.767.910	1,1%	0	0,0%
2.3. Dana Alokasi Umum/ General Allocation Fund	565.598.771	50,8%	565.244.405	52,5%
2.4. Dana Alokasi Khusus/ Special Allocation Fund	236.141.584	21,2%	187.783.122	17,4%
2.5. Dana Desal/ Village Fund	164.822.155	14,8%	151.437.299	14,1%
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah/ Other Legal Revenue	38.144.691	3,4%	33.162.260	3,1%
B. Pembiayaan Daerah/ Local Government Financing	29.924.393	2,7%	43.718.786	4,1%
1. Penerimaan Pembiayaan	32.924.393	3,0%	47.718.786	4,4%
2. Pengeluaran Pembiayaan	(3.000.000)	-0,3%	(4.000.000)	-0,4%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor.
Source: Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Alor Regency

Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Alor pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,29 persen dibandingkan tahun 2021. Sebagian besar sumber penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Alor pada tahun 2022 yakni berasal dari **dana perimbangan** sebesar 70,8 persen.

Sejalan dengan penerimaan daerah, perolehan dana perimbangan pada tahun 2022 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 yakni turun sebesar 23,41 persen. Komponen yang memiliki kontribusi paling besar dari dana perimbangan yang diperoleh Kabupaten Alor berasal dari **Dana Alokasi Umum (DAU)** yakni 52,5 persen disusul Dana Alokasi Khusus 17,4 persen dan dana desa 14,1 persen dari total seluruh penerimaan daerah.

Sebaliknya, penerimaan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya memiliki kontribusi sebesar 6 persen pada selama tahun 2022. PAD merupakan salah satu indikator dari tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam membentuk pendapatan daerah, maka semakin mandiri daerah tersebut dalam menjalankan otonomi daerah.

Kemandirian daerah memiliki dampak positif salah satunya adalah pemerintah daerah dapat membiayai sendiri kegiatan pelayanan di daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan

*Receivement of Alor Regency Government in 2022 has decreased by 3.29 percent compared to 2021. Most of the sources of Alor Regency local government revenue in 2022 come from **balancing funds** of 70.8 percent.*

*In line with Regional Receivement, the nominal of Balancing Funds in 2022 also decreased compared to 2021, which decreased by 23.41 percent. The component that has the largest contribution of balancing fund of Alor Regency comes from the **General Allocation Fund (DAU)**, which is 52.5 percent, followed by the Special Allocation Fund 17.4 percent and village funds 14.1 percent of the total regional receivement.*

On the other hand, regional revenue sourced from Local-own Original Income (PAD) only contributes 6 percent during 2022. PAD kontribution is one of all indicator of a local fiscal independence. The greater the contribution of PAD in forming regional income, the more independent the region in carrying out regional autonomy.

Regional independence has a positive impact, one of which is local governments can finance their own service activities in their regions so that they can reduce dependence on transfer funds from outside, including

terhadap dana transfer dari luar termasuk dari pemerintah pusat.

Komponen pendapatan daerah yang berkontribusi paling besar dalam PAD di Kabupaten Alor pada tahun 2022 adalah retribusi daerah yakni sebesar 3 persen, disusul pendapatan lain-lain PAD yang sah sebesar 1,7 persen dan pajak daerah 1,3 persen. Pada tahun 2022 Pendapatan dari retribusi daerah meningkat sebesar 41,58 persen. Hal ini lah yang menyebabkan peningkatan perolehan PAD Pemerintah Kabupaten Alor.

Selain dari sisi PAD dan Dana Perimbangan serta pendapatan lain-lain yang sah, penerimaan pemerintah daerah juga berasal dari pembiayaan. Pada tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Alor memperoleh pembiayaan yang positif sebesar 4,1 persen dari total seluruh penerimaan daerah. Pembiayaan daerah yang positif berarti penerimaan lebih besar daripada pengeluaran dalam pembiayaan.

from the central government.

The component of regional income that contributes the most to PAD in Alor Regency in 2022 is regional retribution, which is 3 percent, followed by other legitimate PAD revenues of 1.7 percent and local taxes of 1.3 percent. In 2022 Revenue from local retribution increased by 36.13 percent. This is what causes an increase in the revenue of the Alor Regency Government's PAD.

Apart from the PAD and Balancing Funds and other legitimate income, local government revenues also come from financing. In 2022 the local government of Alor Regency will receive positive financing of 4.1 percent of the total regional revenue. Positive regional financing means that revenues are greater than expenditures in financing.

Tabel 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Alor, 2021-2022
Table 3. Realization of Local Expenditure of Government of Alor Regency, 2021-2022

Indikator/ Indicators	2021 (Rp.000)	Kontribusi/ Contribution	2022 (Rp.000)	Kontribusi/ Contribution
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PENGELOUARAN DAERAH/ LOCAL GOVERNMENT EXPENDITURE	1.065.587.208	100,0%	1.043.724.621	100,0%
1. Belanja Pegawai/ <i>Personnel Expenditure</i>	338.126.915	31,7%	361.127.696	34,6%
2. Belanja Barang dan Jasa/ <i>Good and service Expenditure</i>	247.400.719	23,2%	265.383.514	25,4%
3. Belanja Bunga/ <i>Interest Expenditure</i>	-	0,0%	0	0,0%
4. Belanja Subsidi/ <i>Subsidy Expenditure</i>	-	0,0%	0	0,0%
5. Belanja Hibah/ <i>Grant Expenditure</i>	44.613.434	4,2%	8.045.538	0,8%
6. Belanja Bantuan Sosial/ <i>Social Assistant Expenditure</i>	16.825.544	1,6%	21.657.099	2,1%
7. Belanja Modal/ <i>Capitals Expenditure</i>	192.289.964	18,0%	172.918.278	16,6%
8. Belanja Tidak Terduga/ <i>Unpredicted Expenditure</i>	1.551.406	0,1%	2.550.000	0,2%
9. Belanja Bagi Hasil/ <i>Sharing Fund Expenditure</i>	692.205	0,1%	780.477	0,1%
10. Belanja Bantuan Keuangan/ <i>Financial Assistance Expenditure</i>	224.087.021	21,0%	211.262.019	20,2%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Alor.

Source: *Regional Finance and Assets Agency (BKAD) of Alor Regency*

Pengeluaran pemerintah daerah Kabupaten Alor pada Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 2,05 persen atau turun sekitar 21 miliar rupiah. Kontribusi jenis pengeluaran yang paling besar adalah pada belanja pegawai. Sejalan dengan total

Alor Regency government spending in 2021 has decreased compared to 2020 by 0.54 percent or decreased by around 21 billion rupiah. The biggest contribution of this type of expenditure is on personnel expenditure. In line with total

pengeluaran, belanja pegawai juga mengalami penurunan, yakni sebesar 6,8 persen. Penurunan belanja pegawai ini disebabkan dibatasinya honorarium.

Selain belanja pegawai, pada tahun 2022 komponen belanja bantuan keuangan merupakan jenis pengeluaran yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,72 persen dengan kontribusi sebesar 20,2 persen dari total seluruh pengeluaran. Bantuan keuangan yang dimaksud di sini adalah bantuan keuangan kepada desa.

Berbeda dengan belanja pegawai dan belanja bantuan keuangan yang mengalami penurunan, belanja barang dan jasa justru meningkat pada tahun 2022 sebesar 7,27 persen dibandingkan tahun 2021 dimana kontribusinya pada tahun 2022 juga bertambah menjadi 25,4 persen. Komponen terbesar penyusun belanja barang dan jasa yaitu belanja barang habis pakai, belanja jasa kantor, jasa asuransi pemeliharaan gedung dan bangunan, perjalanan dinas, belanja barang/ jasa untuk diserahkan/dijual dll.

expenditure, personnel expenditure also decreased, namely by 6.8 percent. This decrease in employee spending was due to limited honorariums.

Apart from personnel expenditure, in 2022 the financial aid expenditure component is a type of expenditure that has decreased compared to 2021 by 5.72 percent with a contribution of 20.2 percent of the total expenditure. The financial assistance referred to here is financial assistance to villages.

In contrast to personnel spending and financial aid spending which experienced a decline, spending on goods and services actually increased in 2022 by 7.27 percent compared to 2021 where its contribution in 2022 also increased to 25.4 percent. The biggest components that make up spending on goods and services are spending on consumable goods, spending on office services, building and building maintenance insurance services, business travel, shopping for goods/services to be delivered/sold, etc.

<https://alorkab.bps.go.id>

ST2023

SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

Enlighten The Nation



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN ALOR
BPS-STATISTICS OF ALOR**

Jl. Panglima Polim No 17, Kalabahi- Kabupaten Alor 85811,

Telp.: Telp. (0386) 21046, Fax. (0386) 222468

Homepage: <http://alorkab.bps.go.id> , Email : bps5307@bps.go.id